

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam pertanyaan penelitian, seperti yang telah disebutkan pada Bab I terdahulu, dipertanyakan; Strategi apa yang dikembangkan oleh perempuan usaha mikro dalam menghadapi persoalan kultural dan struktural dan sejauh mana strategi tersebut memengaruhi posisi perempuan. Sedangkan pertanyaan turunan penelitian adalah sejauh mana strategi dan capaian perempuan usaha mikro memengaruhi faktor kultural dan struktural serta sejauhmana program LSM dan kelompok membantu memecahkan masalah yang dihadapi PUM. Setelah memperoleh data dan informasi mengenai perempuan usaha mikro, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

PUM kelas bawah yaitu PUM dengan latar belakang pendidikan rendah, modal rendah dengan latar belakang keluarga yang sangat sederhana sesungguhnya berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga dan berfungsi sebagai tiang penyangga perekonomian keluarga. PUM kelas menengah dengan latar belakang pendidikan menengah, modal lebih besar dengan latar belakang keluarga sederhana hanya sebagian sebagai pencari nafkah utama dan selebihnya hanya mencari kesibukan, aktualisasi diri dan menyalurkan hobi karena anak sudah besar.

Hampir semua PUM baik kelas bawah dan menengah menggunakan semua hasil usahanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, sampai kredit motor.

PUM kelas bawah memilih pekerjaan berdasarkan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan dan dekat dengan sumber kehidupan sehari-hari, sedangkan PUM kelas menengah memilih pekerjaan berdasarkan kesempatan, peluang dan keterampilan yang mereka miliki.

PUM kelas bawah memiliki strategi bertahan hidup yang berbeda dengan PUM kelas menengah. PUM kelas bawah pada mulanya hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai nelayan tangkap dan kuli bangunan. Kebutuhan keluarga sehari-hari sangat kekurangan dan untuk menutupi kekurangan

kebutuhan, biasanya PUM terpaksa meminjam uang kepada tetangga, saudara atau kepada rentenir dengan perjanjian setelah panen pinjaman tersebut dikembalikan. Bahkan kadangkala PUM melakukan kerja sebagai buruh di kebun orang dan ke luar daerah mencari pekerjaan musiman. PUM kelas menengah biasanya melakukan bisnis kecil-kecilan berdagang baju dan dikreditkan kepada tetangga.

Karena kondisi tidak memiliki pilihan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, maka PUM kelas bawah, dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi karena tingkat pendapatan per hari yang sangat kecil selalu menjaga siklus keuangan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun melalui mekanisme utang. Diakui oleh PUM, mereka tidak bisa lepas dari mekanisme utang yang tercipta diantara PUM, pemilik modal dan rentenir karena saling memberi keuntungan pada kedua belah pihak, hal mana tidak terjadi pada PUM kelas menengah. Pengambilan keputusan diatas berhubungan dengan posisi perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga, yang mau tidak mau didesak oleh persoalan sehari-hari di depan mata, yang mengharuskan mereka mengambil keputusan segera. Sementara pihak suami tidak demikian, karena suami hanya dituntut untuk bekerja dan tidak dibebani tanggungjawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Pada PUM kelas menengah, dengan pola kerja berbeda dengan PUM kelas bawah, mereka relatif dapat mengatasi persoalan harga dan pasar. Ini karena mereka mempunyai modal lebih besar dan berpendidikan lebih tinggi. Mereka melakukan negosiasi pasar dan harga secara langsung dengan super market dan toko-toko. Demikian juga dalam hal penyediaan bahan baku, PUM melakukan sendiri penawaran langsung ke pemilik modal (pemilik kapal).

Dengan berbagai persoalan kultural dan struktural yang dihadapi PUM secara pribadi seperti di atas, maka dibentuklah Kelompok Perempuan Usaha Mikro (KPUM) atas inisiasi ALPEN sebagai pendamping dan PUM. KPUM menjadi wadah bagi PUM untuk belajar mengeluarkan pendapat, mendapatkan pengetahuan baru tentang relasi gender, dan pengetahuan tentang pengelolaan usaha mikro yang lebih adil dan setara. Melalui KPUM, PUM diberikan pengetahuan membangun komunikasi diantara anggota, sehingga beberapa PUM

yang telah bergabung dalam KPUM, relatif telah dapat berkomunikasi dengan teman-temannya, minimal dalam kelompok. Dengan keterampilan komunikasi yang telah diberikan, beberapa PUM telah dipercaya menjadi ketua kelompok pada organisasi lain seperti majelis taklim, PKK dan dasa wisma. Beberapa PUM menjadi panutan bagi perempuan lain di desanya dan menjadi pelopor dalam kegiatan dan pertemuan yang diadakan di desa.

Menjadi pengurus dalam KPUM memberikan posisi tawar bagi PUM dan diakui oleh mereka, menaikkan status. Relasi dengan pemerintah desa setempat, mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik karena PUM saat ini telah mampu mengemukakan pendapat kepada pemerintah desa mengenai hal yang berhubungan dengan hak PUM.

Walaupun relasi dengan pemerintah setempat mengalami perbaikan namun relasi PUM dalam keluarganya tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, PUM memperoleh beban kerja tambahan yang semakin besar dengan peran domestik. Namun, beban berat PUM ini tidak sertamerta memberikan akses dan kontrol yang baik dalam keluarga. Keaktifan beberapa PUM di luar rumah sebagai aktifis perempuan usaha mikro telah mendorong PUM memiliki keberanian untuk mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Walaupun bergabungnya PUM dalam KPUM berarti menambah beban bagi mereka namun KPUM merupakan satu-satunya katarsis yang bisa pula menjadi media untuk mengaktualisasikan dirinya dan memecahkan persoalan kultural dan struktural yang dihadapi.

Untuk mengatasi persoalan kultural dan struktural yang dialami PUM, KPUM mengembangkan strategi dengan melakukan tiga hal sebagai berikut.

- a. Melalui penyadaran kritis dengan menggugah kepemilikan modal dasar. Menggugah kepemilikan modal dasar dilakukan untuk membangun kesadaran diantara PUM bahwa aset yang dimiliki keluarga yang selama ini atas nama suami dapat digunakan dan dikelola oleh PUM dalam mengembangkan usahanya, seperti tanah, rumah dan barang berharga lainnya, karena PUM sebagai istri juga memiliki hak atas aset tersebut. Selain itu ditumbuhkan pula kesadaran bahwa modal dasar tidak hanya berwujud aset, tetapi juga dukungan sosial dari lingkungan komunitas dan

keluarga. Dukungan sosial ini sangat penting bagi PUM karena menyangkut kepercayaan yang diberikan kepada PUM.

- b. Menumbuhkan solidaritas diantara PUM. Proses menumbuhkan solidaritas ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif PUM agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama-sama, baik persoalan yang menyangkut urusan rumah tangga maupun usaha, karena banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara personal. Membangun solidaritas ini dimulai dengan membuat arisan bulanan sesama anggota. Arisan ini juga berfungsi sebagai wadah simpan pinjam anggota yang bersifat jangka pendek. Bagi PUM arisan ini merupakan pula ajang untuk berbagi informasi baik yang sifatnya teknis maupun pengalaman serta tempat “*curhat*” bagi mereka.
- c. Mengelolah Lembaga Keuangan Perempuan (LKP). LKP bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mencoba mengatasi persoalan keterbatasan akses modal, pasar dan produksi namun juga berfungsi sebagai media pendidikan, tukar pengalaman dan belajar serta menjadi media pengembangan diri. Melalui LKP PUM belajar mengaktualisasikan diri, kesempatan yang sulit mereka dapatkan jika PUM berada pada komunitas laki-laki.

Strategi yang dikembangkan KPUM untuk mengatasi persoalan struktural yaitu melalui pengelolaan LKP dengan baik dan benar sesuai dengan visi misi PUM. LKP didirikan dengan maksud untuk mengatasi masalah teknis dalam usaha yaitu kesulitan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. LKP ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat mengakomodir kepentingan PUM. Lembaga ini diharapkan menjadi lembaga yang *familiar* bagi PUM dan dapat menggeser peran pelepas uang gelap (*rentenir*). Kehadiran LKP diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan dicapai dengan membuka akses dan peningkatan kesejahteraan secara paralel. Tujuan didirikannya LKP ini adalah untuk membuka akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya ekonomi (terutama permodalan), meningkatkan kemampuan PUM dalam mengembangkan usaha, terbangun solidaritas diantara PUM untuk

membangun gerakan. Oleh karena itu LKP sekaligus dapat mengatasi persoalan kultural dan struktural PUM.

Hasil temuan lapangan memperlihatkan bahwa strategi yang dikembangkan KPUM, diakui oleh PUM dapat memengaruhi posisi mereka dalam keluarga, usaha dan komunitas. Semua subjek mengatakan bahwa bergabungnya mereka dalam kelompok PUM dan menjadi anggota LKP dapat mengatasi persoalan teknis usaha sampai persoalan ketidakadilan gender yang selama ini dialami.

Untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi PUM, ALPEN sebagai pendamping melakukan pendampingan dengan bertumpuh pada 2 aspek yaitu aspek ekonomi (usaha) dan aspek relasi gender. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari status PUM sebagai perempuan yang memiliki dan mengelolah usaha mikro, yang praktis mengalami berbagai persoalan yang terkait dengan usaha seperti modal, pemasaran, produksi, izin usaha dan bahan baku.

ALPEN melakukan fasilitasi melalui proses penyadaran kritis di tingkat akar rumput. Kesadaran bahwa dibutuhkan jembatan untuk berbagi informasi dan transformasi pengetahuan dari pendamping ke perempuan tingkat basis, maka proses ini dilakukan pendamping melalui pengorganisasian agar ditemukan kader-kader yang dapat berperan sebagai motor penggerak di tingkat basis yang berfungsi sebagai penerus informasi ke tingkat paling bawah dalam struktur masyarakat dalam kampung tersebut agar dapat tercipta kemajuan. ALPEN melakukan pengorganisasian di tingkat basis dengan menggunakan metodologi *Community Organizer* dengan prinsip-prinsip membangun kesadaran kritis, menggalang swadaya dan melibatkan masyarakat.

Strategi pendampingan ALPEN dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui pelatihan peningkatan kapasitas teknis usaha, lobi dan advokasi. Upaya yang dilakukan ALPEN terkait dengan masalah usaha PUM disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya permasalahan pemasaran, produksi, permodalan dan persaingan harga. Untuk masalah pemasaran, ALPEN telah mendorong terbangunnya jaringan pemasaran produk anggota lintas kecamatan. Pada pertemuan ini juga secara otomatis terjadi pertukaran informasi dalam diskusi mengenai bagaimana mengatasi masalah kredit usaha atau bagaimana

menghasilkan produk yang lebih baik. Selain itu, pertukaran informasi ini juga terjadi di tingkat pertemuan kelompok di setiap kelurahan yang dilakukan setiap minggu. Misalnya; masalah penyakit rumput laut yang dialami oleh seorang PUM, PUM lainnya yang pernah mengalami hal yang sama, membagi informasi kepada temannya cara mengatasi penyakit tersebut.

Pada aspek penguatan usaha, ada 2 strategi yang dikembangkan ALPEN, **pertama**, ALPEN menghubungkan PUM dengan lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD yang memiliki program pengembangan usaha kecil mikro, seperti jamsostek. ALPEN memfasilitasi KPUM dalam membuat proposal kegiatan dan persiapan teknis administrasi yang dibutuhkan. Pada kondisi ini, ALPEN bertindak sebagai penjamin. **Kedua**, ALPEN mengembangkan dana bergulir (revolving fund). Strategi ini dipakai untuk menumbuhkan kemandirian kelompok dalam pengelolaan keuangan. ALPEN memfasilitasi kelompok dalam pengelolaan keuangan sederhana. Kelompok diarahkan untuk menumbuhkan prinsip keswadayaan, kemandirian dan keberlanjutan.

Pada aspek penguatan relasi gender, ALPEN memfasilitasi proses mengembangkan usaha mikro yang dilakukan secara berbarengan dengan penyadaran gender melalui pertemuan rutin, yang menyajikan berbagai materi aktual yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari PUM. Materi dasar yang biasa diberikan adalah materi tentang seks dan gender, kemudian masuk lebih jauh ke persoalan konstruksi sosial terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Membangun relasi PUM dengan masyarakat dan negara melalui pendidikan politik juga dilakukan.

Dalam rangka memberikan kesadaran kritis tentang relasi gender yang adil, ALPEN bersama KPUM melakukan pelatihan kesadaran gender dengan para suami PUM melalui program *life skill* untuk keluarga miskin dan buta aksara. Pada program tersebut, pasangan suami istri dalam rumah tangga ikut menjadi target dan peserta pelatihan. Strategi ini, diharapkan dapat memberikan efek domino terhadap suami-suami yang lain. Harapan lebih jauh, pemahaman tentang kesetaraan gender ini akhirnya dapat dimengerti oleh masyarakat secara umum.

Bentuk lain pendampingan yang dilakukan ALPEN terhadap PUM adalah advokasi kebijakan. Upaya ini dilakukan karena menyadari bahwa peran PUM sangat penting dalam menopang perekonomian keluarga, namun di sisi lain mereka banyak mengalami eksploitasi dalam pengembangan ekonomi, dimana hak-hak mereka seperti hak ekonomi, politik dan sosial kurang terfasilitasi. Pendekatan ini sesuai dengan visi misi ALPEN yang memandang bahwa peningkatan posisi perempuan bukan hanya pada sektor ekonomi saja tetapi pada semua sektor termasuk peningkatan peran perempuan pada sektor publik. Melalui pendekatan ini diharapkan agar perempuan mampu menentukan pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga, keluarga, komunitas, bahkan yang berkaitan dengan kebijakan negara.

Selain advokasi kebijakan, juga dilakukan advokasi kasus dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami PUM dalam menjalankan perannya sebagai pelaku usaha mikro, sebagai istri maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menangani kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan, ALPEN juga bermitra dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dinas sosial dan badan pemberdayaan masyarakat bagian pemberdayaan perempuan. Bersama JARPUK, ALPEN dan organisasi perempuan yang konsen terhadap perempuan korban kekerasan telah mendorong keluarnya PERDA Kota Kendari No.14 tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan.

7.2 Rekomendasi

Kepada PUM : upaya yang dilakukan *stakeholders* tidak akan berhasil jika PUM dan komunitasnya tidak berusaha untuk secara mandiri mengatasi persoalan kultural dan struktural yang dihadapi dalam relasi di dalam rumah tangga, usaha dan komunitas. PUM perlu menyadari dan melakukan internalisasi bahwa pembagian kerja secara seks di dalam rumah tangga, usaha dan komunitas bukan hal yang *given* tapi adalah bentukan budaya yang membuat pembedaan, yang menyebabkan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi dan subordinasi.

Kepada Kelompok dan Masyarakat: Strategi yang dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan perempuan usaha mikro di daerah pesisir, tidak dapat

berhasil tanpa keterlibatan semua pihak. Untuk itu perlu dibangun sinergitas antar PUM, kelompok, pendamping, kelompok masyarakat lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan upaya advokasi kebijakan bersama untuk mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada perempuan usaha mikro.

Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD: perempuan usaha mikro terbukti memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan sarana dan prasarana kota melalui pajak retribusi yang dibayar setiap hari di pasar-pasar tradisional, oleh karena itu hendaknya PUM diperhitungkan keberadaannya dan menghadirkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kepada Pemerintah Pusat; perlu membuat regulasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang belum berpihak pada perempuan usaha kecil dan mikro. Dengan adanya regulasi tersebut, eksekutif dan legislatif di kota Kendari memiliki rujukan dalam merancang Peraturan Daerah (PERDA) usaha kecil dan mikro yang sensitif gender.

Kepada Akademisi: agar melakukan penelitian lanjutan dan studi kebijakan perempuan yang berperspektif gender. Untuk selanjutnya diseminasikan kepada pemerintah, masyarakat, LSM dan pelaku usaha mikro lainnya agar dapat diimplementasikan.